

ANALISIS DAMPAK ALOKASI ANGGARAN DESA DAN INFRASTRUKTUR DESA PADA TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN SEMARANG

Rahayu Sapta Nugraheni¹, Candra Fajri Ananda², Wildan Syafitri³

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

E-mail: saptanugraheni@gmail.com, cfajri@ub.ac.id, wildans@ub.ac.id

Abstract

Although the level of poverty in Indonesia, especially in Semarang Regency has decreased significantly, there are two tendencies to be a concern. Since 2014 village budgets have been granted to villages with significant increases to finance rural development. However, it has not shown any real results. This study aims to analyze the aspects that affect the level of village poverty in Semarang Regency. The aspect is basic infrastructure consisting of market access, health access and educational access, population, village original revenue, transfer revenue (village fund, village fund allocation and tax revenue and local retribution share) and allocation of village expenditure consisting of village development expenditure, community development expenditure and community empowerment expenditure. The result of the study shows that the aspects researched are significantly influence the level of village poverty in Semarang Regency. Aspects that affect the level of poverty indicated by the Wald test results are health access, population, Village Original Revenue, allocation of development expenditure, allocation of community empowerment expenditure. Quadrant analysis result shows the comparison between Poverty Percentage to the amount of transfer revenue. The results are fairly even in the four quadrants. In Quadrant II there are 58 villages, with poverty percentage > 40 percent and low transfer income. In Quadrant III which means that the poverty level is low then the value of transfer income is also low with the number of villages is 57. The number of villages in quadrant I is 20 villages with high poverty and low transfer income. The villages in quadrant IV are 17 villages. The villages in quadrant IV are villages with high transfer revenue and also high poverty rates. The conclusion of this research is poverty indicator is no longer focused on economy but also concerning structural, institutional, health and government policy aspects. Development planning needs to be done better so that the village budget can be used as much as possible for the welfare and independence of the community. It is important to the villages to allocate more funds to the populist economic development sector.

Keywords: Population, Infrastructure, Expenditure, Revenue, Poverty

JEL Classification: H72, I38

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah berimplikasi pada pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Ini memberikan implikasi terhadap perubahan sistem manajemen pembangunan daerah. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa (Prasetyo & Masdjojo, 2015). Berdasarkan hal

tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Keuangan desa memiliki peranan penting dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan desa, baik untuk belanja operasional pemerintahan desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa (Pratiwi, 2015).

Pada tahun 2013, persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Semarang jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar sebesar 8,51 persen dan menduduki peringkat 4 se-Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2014 terjadi penurunan persentase kemiskinan menjadi 8,05 persen, meskipun peringkatnya menurun menjadi peringkat 5. Persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Semarang masih di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu 13,53 persen (Bappeda Kab. Semarang, 2016).

Anggaran pendapatan belanja desa dan dana desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Keterkaitan kemiskinan dan anggaran pendapatan belanja desa dan dana desa sangat besar karena anggaran pendapatan belanja desa mampu menurunkan kemiskinan dalam memberdayakan masyarakat desa. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan permukiman, infrastruktur, permodalan/kredit dan informasi bagi masyarakat miskin, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan upaya pengentasan kemiskinan menjadi kurang optimal (Royat, 2009).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan, untuk menganalisis pengaruh anggaran pendapatan dan belanja desa terhadap tingkat kemiskinan, untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Desa

Desa adalah suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu yang ditempati oleh sejumlah orang yang disebut masyarakat yang memiliki satu kesatuan dan adat istiadat yang hidup saling mengenal dan bergotong-ro-yong. Desa merupakan unit pemerintahan yang berada pada level paling

bawah, di mana desa merupakan unit pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan pemerintahan desa. Masyarakat desa sebagian besar mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani atau nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, hukum dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Nurcholis, 2011).

Kemiskinan

Menurut Chambers (1987) kemiskinan berkaitan dengan masalah deprivasi sosial, akses ke sumberdaya seperti air, tempat tinggal, layanan kesehatan dan sanitasi, pendidikan serta transportasi.

Akar masalah kemiskinan adalah ketergantungan, isolasi, ketidakberdayaan (*vulnerability*) dan rendahnya harapan hidup. Oleh karena itu kemiskinan mempunyai banyak sisi: ekonomi, sosial dan politik (Harriss-White, 2005). Secara ekonomi penduduk miskin tidak memiliki apa-apa (*having nothing*), secara sosial mereka tidak menjadi siapa-siapa (*being nothing*), dan secara politik mereka tidak memperoleh hak kecuali korban pembangunan (*having no rights and being wrong*).

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok

baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga. (Kuncoro, 2004), yaitu:

1) Kemiskinan Absolut

Apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, juga tingkat kemajuan negara, dan faktor ekonomi lainnya.

2) Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

3) Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Menurut Samuelson & Nordhaus (1997), penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok, yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan keterampilan penduduknya. Kelima hal itu adalah upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Menurut (Todaro & Smith, 2006) kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara enam karakteristik berikut:

1) Tingkat pendapatan nasional negara berkembang terbilang ren-

- dah, dan laju potensi desanya tergolong lambat.
- 2) Pendapatan perkapita negara-negara berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
 - 3) Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata.
 - 4) Mayoritas penduduk di negara berkembang hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
 - 5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.
 - 6) Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Anggaran Pendapatan Desa (APB-des)

Anggaran Pendapatan Desa diatur langsung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi:

- 1) Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain

- 2) Pendapatan asli desa yang sah dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 persen (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 persen (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- 4) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- 5) Hibah dari sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pendapatan Asli Desa (PAD)

Pendapatan asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan Hasil Usaha termasuk juga hasil BUM Desa dan Tanah Bengkok. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PAD terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan Transfer

Konsekuensi logis lahirnya konsep otonomi daerah adalah hadirnya desentralisasi fiskal. Sistem desentralisasi fiskal yang berlangsung dengan melibatkan desa sebagai sasaran distribusinya melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa (Prasetyo & Masdjojo, 2015).

Komponan Pendapatan Transfer yang diterima Desa yang dituangkan dalam APBDes terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Dana Desa (DD)
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD)
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR)

3. METODE PENELITIAN

Obyek penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Obyek penelitian adalah 151 desa di Kabupaten Semarang

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sudah tersedia dari beberapa sumber. Seperti buku ilmiah, majalah dan tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini data diperoleh dari DPPKAD Kabupaten Semarang, BPS, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, Bappeda Kabupaten Semarang.

Sumber data dari masing-masing variabel yang digunakan Akses Pasar, Akses Kesehatan, Akses Pendidikan, Jumlah Penduduk, PAD Pendapatan Transfers, Belanja Pemerintahan, Belanja Pembangunan, Belanja Pembangunan Kemasyarakatan, Belanja Pemberdayaan Masyarakat, dan Jumlah penduduk miskin pada daerah di Semarang

Populasi dalam penelitian ini adalah daerah di Semarang tahun 2016 sejumlah 152 daerah. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria (1) Daerah yang selalu melaporkan laporan aktivitas selama periode 2016 dengan syarat data yang dilaporkan lengkap sesuai variabel yang diinginkan peneliti dan sesuai jurnal

penelitian terdahulu untuk mengetahui tingkat kemiskinan desa.

Sesuai dengan dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder dan teknik sampling yang digunakan, maka pengumpulan data didasarkan pada teknik dokumentasi data sekunder dengan mencatat/menyalin pada laporan aktivitas desa 2016.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Dalam penelitian diperlukan definisi operasional sebagai batasan untuk menyamakan persepsi sehingga menghindari perbedaan yang terjadi dalam pengertian variabel (Sarwono, 2006).

Variabel dependen (terikat) pada penelitian ini bersifat kategorik, yaitu tingkat kemiskinan pada suatu daerah diberi kode 0 jika tingkat kemiskinan rendah dan diberi kode 1 tingkat kemiskinan tinggi. Sedangkan variabel independennya adalah faktor-faktor yang diduga berpengaruh dalam tingkat kemiskinan suatu daerah

- 1) Tingkat Kemiskinan Desa
 Kategori Desa Miskin dibagi menjadi tinggi, rendah, dihitung dari jumlah penduduk miskin desa tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Kategori Tingkat Kemiskinan Desa (Variabel Y)

Nama	Tinggi = 1	Rendah = 0
Tingkat Kemiskinan Desa	$\geq 40\%$ Jumlah Penduduk Miskin	$<40\%$ Penduduknya miskin

- 2) Akses Pasar
 Pengertian Akses pasar merupakan jarak terdekat Desa dengan Pasar desa atau dengan pasar yang terdekat jika desa tersebut tidak memiliki Pasar Desa. Menggunakan satuan kilometer (km).
- 3) Akses Kesehatan
 Pengertian akses kesehatan merupakan jarak terdekat desa dengan

- rumah sakit negeri atau layanan kesehatan yang setara. Menggunakan satuan kilometer (km).
- 4) Akses Pendidikan
Pengertian akses pendidikan merupakan jarak terdekat desa dengan tempat pendidikan dasar (Sekolah Menengah Pertama) yang ada di desa tersebut atau desa lain yang terdekat.
 - 5) Jumlah Penduduk Desa
Pengertian Jumlah penduduk desa adalah jumlah penduduk di tiap-tiap Desa sampel di Kabupaten Semarang pada tahun 2016.
 - 6) Pendapatan Asli Desa (PAD)
Pengertian PAD Adalah Pendapatan Asli Desa yang sah yang diterima oleh desa pada tahun 2016 yang bersumber dari kekayaan desa, swadaya dan gotong royong.
 - 7) Dana Transfer
Merupakan Dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Dana Desa), Dana transfer dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang bersumber dari APBD (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BH-PRD) pada Tahun 2016 yang diterima masing-masing desa sampel di Kabupaten Semarang.
 - 8) Belanja Pembangunan
Merupakan Alokasi belanja yang meliputi belanja infrastruktur desa, jalan, jembatan, talud, saluran irigasi, dll yang tercantum dalam APBDes Desa di Kabupaten Semarang Tahun 2016
 - 9) Belanja Pembinaan Kemasyarakatan
Merupakan Alokasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan yang meliputi belanja pembinaan lembaga masyarakat, kerukunan umat beragama, kesenian dan sosial budaya yang tercantum dalam APBDes Desa di Kabupaten Semarang Tahun 2016

- 10) Belanja Pemberdayaan Masyarakat

Merupakan Alokasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari kegiatan pendukung ekonomi, peningkatan kader pemberdayaan masyarakat desa, bumdes, peningkatan kapasitas kelompok penduduk miskin yang tercantum dalam APBDes Desa di Kabupaten Semarang Tahun 2016

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Analisis Regresi Logistik

Regresi Logistik adalah suatu metode analisis statistika untuk mendeskripsikan hubungan antara peubah respon (*dependent variable*) yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih peubah penjelas (*independent variable*) berskala kategori atau interval (Hosmer & Lemeshow, 2000). Regresi Logistik merupakan regresi non-linear, digunakan untuk menjelaskan hubungan antara X dan Y yang bersifat tidak linear, ketidaknormalan sebaran Y, keragaman respon tidak konstan yang tidak dapat dijelaskan dengan model regresi linear biasa (Agresti, 1996)

Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit)

Model yang digunakan harus layak atau memenuhi *Goodness of Fit* (GoF). Suatu model dikategorikan memenuhi GoF jika terdapat kesesuaian antara data yang dimasukkan dalam model dengan data yang diamati (Wirasmita, 2008). Dalam Regresi Logistik, metode untuk menguji kelayakan model biasanya menggunakan Metode Pearson, Deviance dan Hosmer-Lemeshow. Suatu model dikategorikan layak memenuhi GoF jika hasil uji Hosmer-Lemeshow bernilai $<0,05$ (Ghozali, 2006).

Uji Keseluruhan Model secara Simultan dengan Uji G

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh peubah-peubah bebas yang digunakan dalam model secara bersama-sama terhadap peubah respon. Uji G pada taraf kepercayaan 95 persen. Rumus untuk uji G didasarkan pada hipotesis: $H_0: \beta_i=0$; (H_1 =sekurang-kurangnya ada satu $\beta_i \neq 0$ ($i=1,2,3,\dots,p$)). Statistik uji G adalah rasio kemungkinan maksimum (*likelihood ratio test*) yang didefinisikan: $G = -2 \ln \frac{L_0}{L_1}$ dimana L_0 = Likelihood tanpa peubah penjelas (model hanya terdiri dari konstanta saja), dan L_1 = Likelihood dengan peubah penjelas (model yang terdiri dari seluruh peubah). Prinsip dari metode maksimum *likelihood* adalah mencari nilai β_{ii} dengan memaksimumkan fungsi *likelihood*. Statistik G mengikuti sebaran χ^2 dengan derajat bebas p . Kaidah keputusan yang diambil menolak H_0 jika $G > \chi^2_{\alpha}(p)$ (Hosmer & Lemeshow, 2000). Bila H_0 ditolak, artinya model signifikan pada tingkat signifikansi α .

Uji Parsial dengan Wald (W)

Statistik Uji Wald (W) yang digunakan untuk menguji parameter β_{ii} secara parsial (Hosmer & Lemeshow, 2000) didasarkan hipotesis: $H_{0000}: \beta_{ii} = 0$ lawan $H_{1111}: \beta_{ii} \neq 0$ ($ii = 1,2,3, \dots, pp$). Statistik uji yang digunakan adalah $W_{ii} = \beta / SE(\hat{\beta}_{ii})$ di mana $\hat{\beta}_{ii}$ merupakan penduga β_{ii} dan $SE(\hat{\beta}_{ii})$ adalah penduga galat baku dari β_{ii} . Statistik W mengikuti sebaran normal baku. Kaidah keputusannya adalah: H_0 ditolak jika $|W_{ii}| > Z_{\alpha/2}$. Bila H_0 ditolak, parameter tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α . (Sekaran & Bougie, 2016).

Penafsiran Koefisien

Menafsirkan koefisien dalam model Regresi Logistik dilakukan berdasarkan koefisien *Odds ratio* (per-

bandingan risiko). Jika suatu peubah penjelas mempunyai tanda positif, maka nilai rasio Odds akan lebih besar dari satu, sebaliknya jika tanda koefisiennya negatif maka nilai rasio Odds akan lebih kecil dari satu (Rokhman & Hassan, 2012).

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan di Kabupaten Semarang

Kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah (Todaro & Smith, 2006). Sehingga berbagai macam program baik yang bersifat terpusat maupun di daerah terus dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Prosentase kemiskinan di Kabupaten Semarang dari tahun 2010-2015 cenderung mengalami penurunan cukup signifikan. Pada tahun 2010 angka kemiskinan mempunyai nilai prosentase sebesar 10,50 persen, sedangkan pada tahun 2015 7,89 persen (Bappeda Kab. Semarang, 2016). Nilai angka kemiskinan di Kabupaten Semarang lebih rendah dari angka Provinsi Nasional maupun Adanya penurunan prosentase sebesar 2,61 persen dalam waktu 5 tahun.

Kondisi jumlah keluarga miskin di Desa di Kabupaten Semarang tahun 2015 berdasarkan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 Kecamatan Suruh mempunyai nilai tertinggi pada individu miskin sebesar 22.740 orang, sedangkan nilai individu miskin terendah sebesar 7.556 orang di Kecamatan Ungaran Barat. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah Keluarga Miskin Tertinggi di Kecamatan Suruh dan terendah di Kecamatan Ungaran Barat. Kondisi ini dipengaruhi oleh posisi pusat pemerintahan Kab. Semarang yang berada di wilayah Kecamatan Ungaran Barat, maka menyebabkan tingkat kemiski-

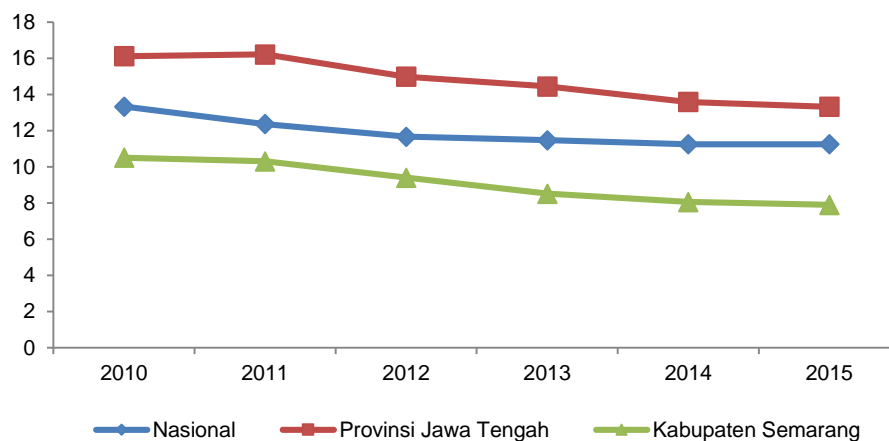
nan di daerah tersebut relatif rendah. Kecamatan Suruh dengan jumlah penduduk yang rata-rata sebagai petani menyebabkan wilayah ini mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi baik secara individu maupun keluarga. Masyarakat yang berada di wilayah dengan tingkat keterbatasan alam (letak terpencil, jalan jelek dan biaya transportasi tinggi), fungsi dan peranan Struktur Pemerintah yang tidak maksimal, tidak ada dan tidak berperannya serta sulitnya akses pada lembaga-lembaga pendukung sebagaimana yang seharusnya dapat diharapkan juga menjadi faktor daerah tersebut di kategorikan miskin (Soesilo et al., 2007).

Akses Pasar Desa terhadap tingkat kemiskinan Desa

Kabupaten Semarang dari 152 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, sebanyak 37 desa memiliki pasar desa yang masih berfungsi atau digunakan untuk kegiatan jual beli baik produk pertanian maupun kebutuhan lainnya. Desa lainnya tidak mempunyai pasar desa sehingga harus menuju desa lain yang terdekat untuk melakukan transaksi jual beli. Jarak yang ditempuh sekitar 0,5-13 km yang paling jauh. Variabel akses pasar tidak signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan Desa di Ka-

bupaten Semarang. Desa Branjang yang berada di Kecamatan Ungaran Barat yang berbatasan dengan Kota Semarang adalah desa dengan jarak akses pasar yang paling jauh yaitu 13 km, tapi tingkat kemiskinan di desa tersebut relatif rendah dari desa lainnya.

Akses pasar tidak menjadi variabel yang menentukan tingkat kemiskinan desa karena pasar desa tidak berfungsi sebagai tempat utama kegiatan ekonomi berlangsung. Fungsinya dipakai untuk kegiatan belanja sehari-hari dalam skala kecil. Hasil produksi pertanian biasanya dipasarkan ke pasar induk yang berada di kota/kabupaten lain. Dari hasil Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan antara lain rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan kondisi keterisolasian (Kartasmita, 1997). Akses pasar mempunyai nilai sig wald 0,724 lebih dari 0,05 sehingga menerima H_0 . Artinya Akses Pasar tidak signifikan membawa pengaruh parsial terhadap Tingkat Kemiskinan Desa. Arah pengaruh akses pasar terhadap tingkat kemiskinan Desa dapat dijelaskan bahwa semakin jauh akses pasar desa akan mengurangi kemungkinan tingkat kemiskinan daerah tersebut tinggi.



Gambar 1. Persentase Kemiskinan Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2015
Sumber Data: Bappeda Kabupaten Semarang 2016, diolah

Akses kesehatan terhadap tingkat kemiskinan Desa

Data Bappeda Kabupaten Semarang, terdapat peningkatan jumlah fasilitas kesehatan. Tahun 2010 terdapat 3 (tiga) unit Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran, Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa dan Rumah Sakit Swasta yaitu Rumah Sakit Umum Bina Kasih Ambarawa. Rasio Rumah Sakit mengalami peningkatan dikarenakan ada penambahan 1 (satu) Rumah Sakit Swasta yaitu Rumah Sakit Ken Saras. Jarak yang ditempuh masyarakat desa untuk menuju ke Rumah Sakit rata-rata sejauh 9,6 km. Selain Rumah Sakit juga terdapat 26 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang lebih dekat dengan desa sebagai pertolongan pertama. Selain fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Kab. Semarang, masyarakat dengan jarak yang jauh pada akhirnya beralih ke Rumah Sakit daerah lain (Kota Salatiga) yang mempunyai jarak lebih dekat. Namun demikian menjadi kendala bagi warga miskin yang mempunyai Kartu Miskin atau Kartu Indonesia Sehat untuk bisa dipakai di daerah lain.

Akses Kesehatan mempunyai nilai sig wald 0,026 lebih kecil dari 0,05 sehingga menolak H_0 . Artinya Akses Kesehatan membawa pengaruh parsial terhadap Tingkat Kemiskinan Desa. Arah pengaruh Akses Kesehatan terhadap tingkat kemiskinan Desa dapat dijelaskan bahwa semakin jauh akses kesehatan desa akan menaikkan kemungkinan tingkat kemiskinan daerah tersebut tinggi. Penelitian (Widodo, Waridin, & Kodoatie, 2012) bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (dalam hal ini penyediaan akses kesehatan), baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan kebijakan yang *pro poor* yang mempunyai dampak negatif terhadap kemiskinan. Menurut (Sen, 1985) bahwa masalah kemiskinan tidak hanya ma-

salah pendapatan yang lebih rendah dari yang lain tetapi terkait dengan kapabilitas oleh seseorang atau daerah terhadap masalah akses, termasuk akses pada pelayanan kesehatan.

Akses Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan Desa

Akses Desa ke SMP yang terdekat bervariasi dari 0 km sampai dengan yang paling jauh 7 km yaitu desa Kadirejo, Desa Kalikayen dan Desa Tempuran. 0 Km artinya Desa tersebut memiliki SMP baik negeri ataupun swasta. Dari 152 sampel sebanyak 62 desa memiliki SMP di desa tersebut. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 90 Desa warganya harus menuju Desa lain dengan jarak yang bervariasi namun masih bisa terjangkau. Rasio ketersediaan SMP/MTs dengan penduduk usia 13-15 tahun mencapai 0,3 pada tahun 2015, namun kebutuhan 45.776 penduduk usia 13-15 untuk bersekolah bisa terlayani, dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 1.426 rombongan belajar. Sehingga rasio antara jumlah penduduk usia 13-15 tahun dan rombongan belajar tersedia adalah 1: 32, yang artinya bahwa 1 rombongan belajar bisa menampung 32 siswa sehingga sudah memenuhi SPM (Bappeda Kab. Semarang, 2016).

Akses pendidikan menengah pertama (SMP) tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Terbatasnya akses-akses pendidikan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang telah meningkat ke jenjang yang lebih tinggi di Tingkat pendidikan di atasnya. Karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan suatu wilayah (World Bank, 2002).

Pengaruh Jumlah Penduduk dengan tingkat kemiskinan Desa

Jumlah penduduk terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan desa di Kabupaten Semarang. Kenaikan jumlah penduduk mengurangi kemungkinan tingkat kemiskinan desa tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Mustikawati, 2016), menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Dari sisi sumberdaya manusia, penduduk Kabupaten Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2014 penduduk kabupaten Semarang berjumlah 955.481 pada tahun 2015 sebesar 961.421 jiwa dan pada akhir tahun 2016 mencapai 1.055.677 jiwa dengan penduduk terbanyak ada pada kecamatan Ungaran Barat sebesar 77.234 jiwa. Sedangkan Desa yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Desa Leyangan di Kecamatan Ungaran Timur yaitu sebesar 10.851 jiwa pada tahun 2016. Namun di sisi lain Desa Leyangan memiliki prosentase kemiskinan yang paling rendah. Karena letaknya yang dekat dengan ibukota kabupaten sehingga akses baik pendidikan, kesehatan dan ekonomi lebih mudah didapat. Karakteristik desanya pun sudah mirip dengan kota, sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang industri, hanya sebagian kecil yang menjadi petani. itu juga yang terjadi di sebagian besar desa yang berpenduduk besar, misalnya Bedono, Bergas Kidul, Gondoriyo, Kalisidi, Klepu dan Randu-gunting. Analisa menunjukkan hubungan negatif antara kemiskinan dan jumlah penduduk.

Pengaruh Pendapatan Asli Desa dengan tingkat kemiskinan Desa

Laporan Realisasi Anggaran Desa di Kabupaten Semarang yang digunakan sebagai sampel, ada 4 desa yang tidak memiliki PAD atau PAD sama dengan nol. Yaitu Bedono, Desa Ge-

dangan, Desa Nyamat dan Desa Udun Uwuh. Sedangkan Desa dengan PAD tertinggi yaitu Desa Watu Agung Kecamatan Tuntang dengan PAD sebesar Rp 797.022.000,-. Variabel PAD berpengaruh negatif dengan nilai odds ratio sebesar $-5,27e-10$ dan nilai signifikansi sebesar 0,088 ($<0,1$). Hasil analisa menunjukkan bahwa kenaikan 1 rupiah PAD memiliki kemungkinan menurunkan peluang desa dengan kemiskinan tinggi sebesar $-5,27e-10$. Variabel ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan desa.

Pendapatan Asli Desa terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Menunjukkan bahwa pendapatan desa penting bagi kemandirian desa. Semakin tinggi PAD yang dihasilkan suatu desa semakin tinggi pula kemandirian desa tersebut. Artinya bahwa kemungkinan desa tingkat kemiskinan rendah. Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat (Jolianis, 2016). Artinya bahwa apabila PAD mengalami peningkatan akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin karena sebagian PAD yang diterima digunakan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan. Tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan rata-rata daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatan diharapkan kemiskinan desa turun (Todaro & Smith, 2006).

Pengaruh Pendapatan Transfer dengan tingkat kemiskinan Desa

Variabel pendapatan transfer berpengaruh positif dengan nilai odds ratio sebesar $1,23e-10$ dan nilai signifikansi sebesar 0,498 ($>0,05$). Hasil analisa menunjukkan bahwa kenaikan 1 rupiah pendapatan transfer memiliki kemungkinan menaikkan peluang desa dengan kemiskinan sebesar $1,23e-10$. Namun variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan desa.

Tabel 1. Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2010- 2016

No	Uraian	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk	933.764	938.802	944.277	945.815	955.481	961.421	1.005.677
2	Kepala Keluarga	272.243	283.303	287.306	291.008	299.405	307.338	325.168
3	Berdasarkan Jenis Kelamin - Laki-Laki - Perempuan	459.771	462.592	465.467	468.328	471.071	473.925	503.539
		473.993	476.210	478.810	481.810	484.410	487.496	502.138
4	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	983	988	994	1.000	1.006	1.012	1.058
5	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0.57	0.54	0.58	0.59	0.60	0.60	0.63

Sumber: Bappeda Kabupaten Semarang 2016, diolah

Pendapatan Transfer atau alokasi anggaran dari pemerintah kepada pemerintah desa terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa (Azwardi & Sukanto, 2014). Kebijakan pemerintah melalui alokasi anggaran/ pengeluaran yang bersifat pro rakyat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan (Bappenas, 2013). Dalam nawacita butir ketiga program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo juga menyebutkan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Namun karena waktu yang masih relatif pendek menyebabkan program ini belum cukup mampu mengatasi masalah kemiskinan yang sangat kompleks.

Pengaruh Belanja Pembangunan Desa dengan tingkat kemiskinan Desa

Belanja Pembangunan Desa adalah belanja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau fisik. Berupa pembangunan jalan desa, talut, jembatan, gedung fasilitas umum dan sejenisnya. Menurut Laporan Realisasi Anggaran Desa di Kabupaten Semarang desa yang memiliki Belanja Pembangunan Desa terendah yaitu Tenga-

ran sebesar Rp 139.888.000, sedangkan desa dengan alokasi belanja pembangunan desa tertinggi yaitu Desa Kedungringin sebesar Rp 1.304.651.600 (Bapermasdes Kab. Semarang, 2016). Variabel Belanja Pembangunan berpengaruh positif dengan nilai odds ratio sebesar 1.15e-09 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Hasil analisa menunjukkan bahwa kenaikan 1 rupiah Belanja Pembangunan memiliki kemungkinan menaikkan peluang desa dengan kemiskinan tinggi sebesar 1.15e-09.

Alokasi belanja Pembangunan desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan desa. Alokasi belanja pembangunan menitikberatkan pembangunan dibidang infrastruktur desa. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur, lingkungan desa, kesehatan dan sarana pendidikan, (Sari & Abdullah, 2017). Pembangunan infrastruktur desa didanai dari alokasi belanja pembangunan. Desa bisa lebih leluasa untuk mengembangkan infrastruktur desa sesuai dengan kebutuhannya dengan adanya desentralisasi fiskal/otonomi desa. Desa dengan kemiskinan tinggi akan menganggarkan alokasi belanja pembangunan yang besar untuk memperbaiki infrastruktur desa dibandingkan desa

dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Pengaruh Belanja Pembinaan Kemasyarakatan dengan tingkat kemiskinan Desa

Terdapat 3 desa yang tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Belanja Pembinaan Kemasyarakatan yaitu Desa Pasekan, Desa Brongkol dan Desa Bajelan. Sedangkan Desa dengan Alokasi belanja Pembinaan Kemasyarakatan tertinggi yaitu Desa Genting sebesar Rp 374.212.835,-

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Alokasi Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan desa. Variabel Belanja Pembinaan Kemasyarakatan berpengaruh positif dengan nilai odds ratio sebesar $6.94e-10$ dan nilai signifikansi sebesar $0,135 (>0,05)$. Hasil analisa menunjukkan bahwa kenaikan 1 rupiah Belanja Pembinaan Kemasyarakatan memiliki kemungkinan menaikkan peluang desa dengan kemiskinan tinggi sebesar $6.94e-10$.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Alokasi Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan tidak signifikan mempengaruhi probabilitas tingkat kemiskinan desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh alokasi anggaran ini lebih banyak diperuntukkan untuk honor-honor tenaga teknis, bukan untuk kegiatan yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan. Belanja honor-honor tersebut seharusnya ada dalam alokasi belanja lain. Yaitu di dalam Belanja pemerintahan desa yang memang menampung kegiatan belanja pegawai dan perangkat desa.

Pengaruh Belanja Pemberdayaan Masyarakat dengan tingkat kemiskinan Desa

Desa yang tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Belanja Pemberdayaan Masyarakat adalah Desa Bantal, sedangkan Desa dengan Alokasi Belanja Pemberdayaan Masyara-

kat tertinggi yaitu Desa Jembrak Kecamatan sebesar Rp 349.765.500,-. Variabel Belanja Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh positif dengan nilai *odds ratio* sebesar $1.49e-09$ dan nilai signifikansi sebesar $0,002 (<0,05)$. Hasil analisa menunjukkan bahwa kenaikan 1 rupiah Belanja Pemberdayaan Masyarakat memiliki kemungkinan menaikkan peluang desa dengan kemiskinan tinggi sebesar $1.49e-09$. Variabel ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan desa.

Alokasi belanja pemberdayaan masyarakat meliputi belanja pada peningkatan sumberdaya manusia, pemberian bantuan langsung seperti renovasi rumah tidak layak huni, pembuatan jamban rumah tangga miskin, penyelenggaraan promosi kesehatan, gerakan hidup sehat dan bersih. Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran belanja Pemberdayaan Masyarakat dapat sampai pada penduduk miskin. Program-program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah desa di Kabupaten Semarang dibiayai dari alokasi anggaran ini. Tidak heran jika desa dengan kemiskinan tinggi menganggarkan anggaran yang besar di belanja ini. Sehingga dengan adanya alokasi belanja Pemberdayaan Masyarakat yang tinggi tentunya mendukung terhadap keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

5. KESIMPULAN, SARAN, DAN BATASAN

Alokasi Dana Desa berdampak pada beberapa faktor yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan desa yaitu akses kesehatan. Pertambahan jumlah penduduk secara negatif mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pada keadaan di lapangan bawah penggunaan dana desa masih di digunakan untuk membangun infrastruktur desa. Sedangkan alokasi anggaran dibidang pemberda-

yaan masyarakat terbukti berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa. Kegiatan kegiatan yang dibiayai alokasi anggaran ini seperti bedah rumah, beasiswa bagi anak dari keluarga miskin, pembiayaan BPJS bagi warga miskin telah dialokasikan oleh desa di Kabupaten Semarang.

Perlunya menambah tempat pelayanan kesehatan setara Rumah sakit secara merata di wilayah Kabupaten. Adanya perencanaan anggaran untuk membiayai pembangunan di desa yang lebih baik. Pelatihan *budgeting* bagi perangkat desa agar pembangunan desa lebih terarah dan terintegrasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga dana desa yang diberikan dapat dioptimalkan bagi pembangunan desa dan kesejahteraan warga desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agresti, A. (1996). *An introduction to categorical data analysis* (Vol. 135). New York: Wiley New York.
- Azwardi, & Sukanto. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29–41.
- Bappeda Kab. Semarang. (2016). *Peraturan Daerah 15 tahun 2016 tentang RPJD Kabupaten Semarang 2016 – 2021*. Kab. Semarang.
- Bappenas. (2013). Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. In *Jakarta: Badan Pusat statistik*.
- Chambers, R. (1987). *Sustainable livelihoods, environment and development: putting poor rural people first*. 30. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. In *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harriss-White, B. (2005). Destitution and the poverty of its politics— with special reference to South Asia. *World Development*, 33(6), 881–891.
- Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2000). Special topics. *Applied Logistic Regression, Second Edition*, 260–351.
- Jolianis. (2016). Analisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Economic And Economic Education*, 4(2), 192–209.
- Kartasasmita, G. (1997). *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuncoro, M. (2004). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Mustikawati. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 2739–2752.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
- Prasetyo, Y., & Masdjojo, G. N. (2015). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di 10 desa wilayah kecamatan rembang

- kabupaten rembang. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 978–979.
- Pratiwi, D. (2015). Implementasi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2010. *Jom FISIP*, 2(1).
- Rokhman, W., & Hassan, A. (2012). Transformational leadership and work outcomes: Organizational justice as mediator. *World Review of Business Research*, 2(4), 164–171.
- Royat, S. (2009). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, William D. (1997). *Makro Ekonomi* (Keempat). Jakarta: Erlangga.
- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di kabupaten tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 34–49.
- Sarwono, J. (2006). Analisis data penelitian menggunakan SPSS. In *Penerbit ANDI. Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Sen, A. (1985). Well-being, agency and freedom: The Dewey lectures 1984. *The Journal of Philosophy*, 82(4), 169–221.
- Soesilo, Y. H., Suman, A., & Kaluge, D. (2007). Penyebab Kemiskinan Masyarakat Tani. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 1(No. 1), 57–67.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (Terjemahan). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah Di sektor pendidikan dan kesehatan Terhadap pengentasan kemiskinan melalui Peningkatan pembangunan manusia di Provinsi jawa tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25–42.
- World Bank. (2002). *Indonesia Economic Quaterly, December 2001*. World Bank.